
**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN KEBUMEN**

Serli Marwati¹ Erny Pratiwi²

Universitas Gunadarma

Email: serlism23@gmail.com

ABSTRAK

Mengukur kinerja keuangan sangat penting dalam menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. Perkembangan kinerja keuangan pemerintah dapat mempengaruhi masyarakat, karena semakin besar kemampuan suatu daerah untuk menggali potensi daerah, tidak hanya untuk menyediakan dana bagi penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, tetapi juga untuk mewujudkan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat. Dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan melihat kinerja Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kebumen pada tahun 2017-2021 berdasarkan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Ketergantungan Keuangan Daerah, kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan APBD dan LRA Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2021 yang diperoleh dari website resmi www.djpk.kemenkeu.go.id. Hasil dari penelitian ini menunjukkan kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kebumen tahun 2017-2021 berdasarkan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dengan rata-rata 15,09 %, berdasarkan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dengan rata-rata 23,49 %, berdasarkan rasio kemandirian Keuangan Daerah dengan rata-rata 64,59%, berdasarkan rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah rata-rata 117%, dan berdasarkan rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah dengan rata-rata 98,87%.

Kata Kunci: Analisis Kinerja Keuangan, Analisis Rasio Keuangan

PENDAHULUAN

Di era globalisasi ini kondisi teknologi sudah semakin modern dan berkembang, terkait perkembangan teknologi pastinya sangat dibutuhkan untuk menjaga perekonomian negara tetap stabil melalui berkembangnya berbagai sektor kinerja, terutama di organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik adalah organisasi yang bergerak dibidang pelayanan publik dan penyelenggaraan negara dalam rangka pelaksanaan konstitusi negara. Organisasi sektor publik sering kali berbentuk Lembaga-lembaga negara, pemerintah atau organisasi yang terkait dengan keuangan pemerintah daerah (Mahmudi, 2016).

Pengertian Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan

rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Otonomi daerah diberikan kepada masing-masing pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah dapat mengelola keuangan daerahnya sendiri. Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara. Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah sejauh mana pemerintah daerah mencapai kinerjanya dibidang keuangan daerah, termasuk pendapatan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator-indikator keuangan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan atau peraturan pemerintah selama periode anggaran. Kinerja tersebut berupa rasio-rasio keuangan sebagai unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD. Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang sekarang berubah menjadi Permendagri nomor 21 tahun 2011 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), bahwa tolak ukur kinerja merupakan komponen lainnya yang harus dikembangkan untuk dasar pengukuran kinerja keuangan dalam sistem anggaran kinerja.

Kabupaten kebumen memiliki potensi alam yang sangat indah dan asri, serta peninggalan sejarah di kabupaten kebumen. Desnitasi pariwisata juga menjadi daya tarik untuk kabupaten kebumen. Kabupaten Kebumen juga telah meraih penghargaan digital Government Award 2023 dari Menteri PANRB untuk kategori penerapan layanan SPBE, karena dinilai berhasil membuat inovasi dalam mengimplementasikan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) secara baik. Hal ini sesuai dengan visi pertama yakni, peningkatan tata Kelola pemerintah yang baik melalui pelayanan birokrasi yang reponsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* terintegrasi dengan mendapatkan penghargaan SPBE Awards, dan masuk 10 besar diseluruh Indonesia.

Penelitian ini berusaha mengkaji dan merumuskan; bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Kebumen pada tahun 2017-2021 berdasarkan rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas pendapatan asli daerah (PAD) dan rasio efisiensi pendapatan asli daerah (PAD). Tujuan penelitian adalah; Mengetahui bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Kebumen pada tahun 2017-2021 berdasarkan rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas pendapatan asli daerah (PAD) dan rasio efisiensi pendapatan asli daerah (PAD).

Definisi laporan keuangan daerah, Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut (Bastian, 2017), laporan keuangan daerah merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan dalam pemerintah daerah yang mempresentasikan secara terstruktur posisi keuangan dari transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kualitas laporan keuangan daerah adalah ukuran-ukuran normatif yang

perlu diwujudkan dalam laporan informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus berkualitas, bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. Menurut (Erlina, 2017), kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ukuran orang yang menilai atau merinci dari suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan transaksi ekonomi yang menyatakan aktivitas yang berhubungan dengan uang dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintahan daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Menurut (Fahmi, 2017), tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang mencakup perubahan dari unsur-unsur laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam menilai kinerja keuangan terhadap perusahaan disamping pihak manajemen perusahaan.

Definisi kinerja pemerintah daerah, Menurut (Muhammad Fadel, 2008) yang dimaksud dengan kinerja pemerintah daerah merupakan kinerja dari organisasi atau instansi pemerintah daerah. Sedangkan Menurut (Mardiasmo, 2018) Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai tanggung jawab organisasi dan manajer dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas tidak hanya mencakup kemampuan untuk membuktikan bagaimana uang publik dibelanjakan, tetapi juga kemampuan untuk membuktikan bahwa uang publik dibelanjakan secara efisien, efisien dan efektif.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), APBD merupakan contoh atau ukuran penting keberhasilan suatu daerah dalam meningkatkan potensi ekonominya. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi lokal, hal tersebut juga akan berdampak positif pada penciptaan lapangan kerja baru bagi penduduk lokal. Seiring dengan bertambahnya lapangan kerja baru, kegiatan ekonomi masyarakat setempat juga berkembang. Selain pengembangan sektor swasta lokal, APBD dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui berbagai langkah yang tercermin dalam APBD. Jika pemerintah daerah menetapkan anggaran belanja pembangunan lebih besar dari anggaran belanja normal, kebijakan perluasan anggaran daerah ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut (Mahsun, Firma dan Heribertus, 2011) (dalam Juddy Julian Pilat dan Jenny Morasa, 2017) anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah daftar yang merinci pendapatan dan pengeluaran/pengeluaran daerah selama satu tahun. Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut (Amani T, 2021) yaitu; fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilitas.

METODE PENELITIAN

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen selama periode 2017-2021. Metode penelitian kuantitatif, Menurut (Sugiyono, 2017) sebuah metode penelitian berdasarkan filsafat positifisme, ini digunakan untuk meneliti pada populasi sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan alat penelitian. Data sekunder di peroleh dari dokumen laporan realisasi APBD kabupaten Kebumen yang didapat dari <https://djpk.kemenkeu.go.id/>.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif berupa angka. Kemudian menggunakan perhitungan sesuai rumus rasio yang terdapat dalam teori untuk melakukan analisis dan memberikan informasi tentang informasi tentang masalah yang ada. Dengan kata lain, analisis dilakukan dengan menentukan rasio keuangan dalam

mengukur kinerja keuangan menurut (Mahmudi, 2019) dengan perhitungan berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2017-2021 sebagai berikut:

1. Rasio Desentralisasi Fiskal

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100$$

2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100$$

3. Rasio Efektivitas PAD

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100$$

4. Rasio Efisiensi PAD

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{\text{Biaya Pemerolehan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini disajikan rangkuman Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Kebumen tahun anggaran 2017-2021 yang diperoleh dari website resmi Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan yaitu <https://djpk.kemenkeu.go.id/> . Data ini diolah untuk menganalisis rasio keuangan dan belanja daerah Kabupaten Kebumen.

Tabel 1. Laporan APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2021
(Dalam Rupiah)

| Uraian | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Pendapatan Daerah | 2.644.349.237.000 | 2.647.019.919.000 | 2.805.865.491.000 | 2.878.556.768.000 | 2.752.338.008.000 |
| Pendapatan Asli Daerah | 239.481.316.000 | 347.309.619.000 | 401.172.210.000 | 417.639.691.000 | 354.421.071.000 |
| Pendapatan Transfer | 1.736.520.547.000 | 1.683.354.032.000 | 1.723.809.820.000 | 1.748.404.196.000 | 2.262.776.473.000 |
| Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | 614.347.374.000 | 616.356.268.000 | 680.883.461.000 | 721.458.881.000 | 135.140.500.000 |
| Belanja Daerah | 2.712.153.687.000 | 2.812.902.414.000 | 2.960.999.393.000 | 3.033.756.768.000 | 2.818.415.166.000 |

Tabel 2. LRA Kabupaten Kebumen Tahun 2017- 2021
(Dalam Rupiah)

| Uraian | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Pendapatan Daerah | 2.713.113.379.677 | 2.639.814.864.398 | 2.818.494.983.541 | 2.763.229.307.229 | 2.832.035.015.733 |
| Pendapatan Asli Daerah | 443.608.862.462 | 352.047.092.282 | 409.163.433.330 | 403.025.963.783 | 427.017.087.115 |
| Pendapatan Transfer | 2.712.419.381.173 | 1.654.135.303.906 | 1.688.387.155.843 | 1.624.225.405.094 | 2.222.532.960.883 |
| Lain-lain Pendapatan yang Sah | 557.085.154.043 | 633.632.468.210 | 720.944.394.368 | 735.977.938.352 | 137.384.967.735 |
| Belanja Daerah | 2.630.271.307.685 | 2.652.047.980.367 | 2.809.549.444.627 | 2.737.681.916.080 | 2.779.840.698.100 |

Analisis Pengelolaan Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan Kabupaten Kebumen dalam bidang keuangan untuk kurun waktu 2017-2021. Rasio yang digunakan oleh penelitian ini dalam menganalisis kinerja keuangan Kabupaten Kebumen adalah: Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Ketergantungan, Rasio Mandiri, Rasio aktivitas dan Rasio Efisiensi. Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kebumen yang didapat dari website resmi departemen keuangan yaitu <https://djpk.kemenkeu.go.id/>. Dari data tersebut nantinya dapat diketahui kinerja keuangan Kabupaten Kebumen.

Berikut ini adalah tabel 3 yang menunjukkan hasil perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2021(Dalam Rupiah).

Tabel 3. Hasil Rasio Derajat Desentralisasi Dan Pola Hubungan Kabupaten Kebumen
(dalam rupiah dan persentase)

| Tahun | Pendapatan Asli Daerah | Pendapatan Daerah | Rasio | Kriteria |
|--|------------------------|----------------------|----------------|---------------|
| 2017 | Rp 443,608,862,461 | Rp 2,713,113,397,677 | 16.35 % | Kurang |
| 2018 | Rp 352,047,092,282 | Rp 2,639,814,864,398 | 13.34 % | Kurang |
| 2019 | Rp 409,163,433,330 | Rp 2,818,494,983,541 | 14.52 % | Kurang |
| 2020 | Rp 403,025,963,783 | Rp 2,763,229,307,229 | 14.59 % | Kurang |
| 2021 | Rp 472,017,087,115 | Rp 2,832,035,015,733 | 16.67 % | Kurang |
| Rata-Rata Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal | | | 15.09 % | Kurang |

Berdasarkan data pada tabel 3 terlihat dari 2017 sampai 2021 selalu mengalami peningkatan maupun penurunan terhadap rasio derajat desentralisasi Fiskal dengan rata-rata 15,09% dengan membentuk kemampuan desentralisasi yang kurang 20%, ini menunjukkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan dikategorikan Kurang setiap tahunnya. Sehingga pemerintah tidak mampu dalam menggunakan anggaran yang sudah ditetapkan.

Berikut ini adalah tabel 4 yang menunjukkan hasil perhitungan Rasio Kemandirian Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2021 (Dalam Rupiah).

Tabel 4. Hasil Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Dan Pola Hubungan Kabupaten Kebumen
(dalam rupiah dan persentase)

| Tahun | Pendapatan Asli Daerah | Pendapatan Transfer | Rasio | Kriteria |
|--|------------------------|----------------------|---------------|-------------------|
| 2017 | Rp 443,608,862,461 | Rp 1,712,419,381,173 | 25.91% | konsultif |
| 2018 | Rp 352,047,092,282 | Rp 1,654,135,303,906 | 21.28% | instruktif |
| 2019 | Rp 409,163,433,330 | Rp 1,688,387,155,843 | 24.23% | instruktif |
| 2020 | Rp 403,025,963,783 | Rp 1,624,225,405,094 | 24.81% | instruktif |
| 2021 | Rp 472,017,087,115 | Rp 2,222,632,960,883 | 21.24% | instruktif |
| Rata-Rata Rasio Kemandirian Keuangan Daerah | | | 23.49% | instruktif |

Berdasarkan data pada tabel 4 terlihat bahwa dari tahun 2017 hingga 2021 selalu mengalami peningkatan maupun penurunan terhadap rasio kemandirian keuangan daerah dengan rata-rata sebesar 23,49% dengan membentuk pola hubungan kemandirian yaitu Instruktif. Dapat dikatakan tingkat kemandirian pemerintah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan terhadap masyarakat masih sangat rendah. Hal ini terjadi karena realisasi antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer lebih besar Pendapatan Transfer dimana dana tersebut berasal dari bantuan pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Kebumen diharapkan lebih menggali sumber-sumber PAD seperti pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Berikut ini adalah tabel 5 yang menunjukkan hasil perhitungan Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2021 (Dalam Rupiah).

Tabel 5. Hasil Rasio Efektivitas PAD Dan Pola Hubungan Kabupaten Kebumen
(dalam rupiah dan persentase)

| Tahun | Realisasi Anggaran PAD | Anggaran PAD | Rasio | Kriteria |
|--|------------------------|--------------------|-------------|-----------------------|
| 2017 | Rp 443,608,862,461 | Rp 293,481,316,000 | 151% | Sangat Efektif |
| 2018 | Rp 352,047,092,282 | Rp 347,309,619,000 | 101% | Sangat Efektif |
| 2019 | Rp 409,163,433,330 | Rp 401,172,210,000 | 102% | Sangat Efektif |
| 2020 | Rp 403,025,963,783 | Rp 417,693,691,000 | 96% | Kurang Efektif |
| 2021 | Rp 472,017,087,115 | Rp 354,421,071,000 | 133% | Sangat Efektif |
| Rata-Rata Rasio Efektivitas PAD | | | 117% | Sangat Efektif |

Berdasarkan data pada tabel 5 terlihat bahwa dari tahun 2017 hingga 2021 selalu mengalami peningkatan maupun penurunan. Rasio Efektivitas PAD dengan rata-rata sebesar 117% dengan membentuk pola hubungan Rasio Efektivitas PAD dapat dikatakan sangat efektif karena di atas 100%. Pada Rasio dengan kriteria sangat efektif dikarenakan realisasi PAD lebih besar dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah. Dapat diartikan kemampuan pemerintah suatu Daerah dalam mencapai Pendapatan Asli Daerah sudah baik karena jumlah realisasinya melebihi jumlah yang dianggarkan. Sementara pada tahun 2020 persentase yang dihasilkan dibawah 100% dikategorikan Tidak Efektif, hal ini dikarenakan nilai Realisasi PAD yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang dianggarkan oleh pemerintah daerah. Tahun 2020 mengalami penurunan yang drastis dikarenakan Indonesia mengalami pandemi covid 19 yang berdampak pada semua bidang

sehingga menyebabkan Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan tidak sesuai dengan anggaran yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Berikut ini adalah tabel 6 yang menunjukkan hasil perhitungan Rasio Efisiensi PAD Kabupaten Kebumen Tahun 2017-2021(Dalam Rupiah).

Tabel 6 Hasil Rasio Efisiensi PAD Dan Pola Hubungan Kabupaten Kebumen
(dalam rupiah dan persentase)

| Tahun | Realisasi Belanja Daerah | Realisasi Pendapatan Daerah | Rasio | Kriteria |
|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------|
| 2017 | Rp 2,630,271,307,685 | Rp 2,713,113,397,677 | 96.95% | TidakEfisiensi |
| 2018 | Rp 2,652,047,980,376 | Rp 2,639,814,864,398 | 100.46% | TidakEfisiensi |
| 2019 | Rp 2,809,549,444,627 | Rp 2,818,494,983,541 | 99.68% | TidakEfisiensi |
| 2020 | Rp 2,737,861,916,080 | Rp 2,763,229,307,230 | 99.08% | TidakEfisiensi |
| 2021 | Rp 2,779,840,698,100 | Rp 2,832,035,015,733 | 98.16% | TidakEfisiensi |
| Rata-Rata RasioEfisiensiPAD | | | 98.87% | TidakEfisiensi |

Berdasarkan data pada tabel 6 terlihat bahwa dari tahun 2017 hingga 2021 selalu mengalami peningkatan maupun penurunan terhadap Rasio Efisiensi PAD dengan rata-rata sebesar 98,87% dengan membentuk pola hubungan Rasio Efisiensi PAD dapat dikatakan tidak efisiensi karena diatas 40%. Hal ini disebabkan karena selisih Belanja Daerah dan Pendapatan sedikit. Pada Belanja Daerah total keseluruhan sebesar Rp 13.609.571.346.868 dan Pendapatan Daerah sebesar Rp 13.766.687.568.579. Sehingga Selisih keduanya sebesar Rp 157.116.221.711 dapat diartikan tingkat kemampuan Kabupaten Kebumen dalam mengefisiensikan biaya yang dikeluarkan belum maksimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut; Nilai Rasio Derajat Desentralisasi pada tahun 2017 sampai 2021 selalu mengalami peningkatan maupun penurunan terhadap Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dengan rata-rata 15,09% dengan membentuk kemampuan desentralisasi yang kurang 20%, ini menunjukkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan dikategorikan Kurang setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Kebumen harus mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan pendapatan Asli daerah dari sumber-sumber lokal seperti pajak daerah dan retribusi daerah. Nilai Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tahun 2017 hingga 2021 selalu mengalami peningkatan maupun penurunan terhadap rasio kemandirian keuangan daerah dengan rata-rata sebesar 23,49% dengan membentuk pola hubungan kemandirian yaitu Instruktif. Hal ini terjadi karena realisasi antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer lebih besar Pendapatan Transfer dimana dana tersebut berasal dari bantuan pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Kebumen diharapkan lebih menggali sumber- sumber PAD seperti pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Nilai Rasio Efektivitas PAD tahun 2017 hingga 2021 selalu mengalami peningkatan maupun penurunan terhadap Rasio Efektivitas PAD dengan rata-rata sebesar 117%. Tetapi pada tahun 2017,2018,2019 dan 2021 Rasio dengan kriteria sangat efektif dikarenakan realisasi anggaran lebih besar dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi untuk tahun 2020 dikategorikan

Tidak Efektif, hal ini dikarenakan nilai Realisasi PAD yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang dianggarkan oleh pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan Kabupaten Kebumen akan sumber daya alam, wilayahnya memiliki tata alam yang indah yang meliputi pesisir, dataran tinggi dan rendah memungkinkan penduduk setempat untuk mengelolanya untuk dijadikan tempat wisata sehingga potensi wisata dapat ditingkatkan untuk menambah pendapatan asli daerah Kabupaten Kebumen. Namun, untuk mempertahankannya, pemerintah daerah harus terus memaksimalkan pendapatan dari potensi pendapatan yang ada. Inisiatif dan kemauan pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Nilai Rasio Efisiensi PAD tahun 2017 hingga 2021 selalu mengalami peningkatan maupun penurunan terhadap Rasio Efisiensi PAD dengan rata-rata sebesar 98,87% dengan membentuk pola hubungan tidak efisien. Hal ini disebabkan karena selisih Belanja Daerah dan Pendapatan sedikit. Untuk ke depannya Pemerintah Kabupaten Kebumen diharapkan dapat meminimalisir jumlah belanjanya dengan disesuaikan dengan pendapatannya. Sehingga kedepannya bisa terjadi peningkatan efisiensi belanja daerah.

REFERENSI

- Bastian, Indra. (2017). Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga. Erlangga: Jakarta.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah-Kabupaten Sukabumi. Diakses tahun 2023.
- Erlina Rasdianto. 2017. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua. Medan: Brama Ardian
- Fahmi, Irham. (2017). Analisis Laporan Keuangan. Bandung: Alfabeta.
- Halim, A. (2013). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat
- Harahap, H. F. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 34- 38.
- Hasanah, Nuramalia dan Achmad Fauzi. (2017). Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: In Media.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Mahmudi. (2016). Akuntansi Sektor Publik Edisi Revisi. Yogyakarta: UII Press.
- . (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, Moh., Firma, Sulistyowati dan Heribertus, Andre Purwanugraha. (2011). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru. Yogyakarta: ANDI
- Martiastuti, H. I., Nugroho, A., & Widyawati, W. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian*, 6(2), 29-36.
- Muhammad, Fadel. (2008). Reinventing Local Government: Pengalamandari Daerah. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

- Odero, E. E. (2017). Menganalisis Kinerja Keuangan Pada PT Kota Karibib. *Jurnal Penelitian dan Refleksi Eropa dalam Ilmu Manajemen* Vol, 5(2).
- Pandjaitan, M. F., Tommy, P., & Untu, V. N. (2018). Analisis kinerja keuangan daerah Pemerintah kota manado tahun 2011-2016. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(3).
- Pilat, J. J., & Morasa, J. (2017). Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011-2015. *Accountability*, 6(1), 45-56.
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587.
- Republik Indonesia. (2011). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. (2006). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.